



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.165, 2020

KEMEN-DPDTT. Jabatan. Kelas Jabatan.

PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 13);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1915);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG JABATAN DAN
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Pegawai di Lingkungan Kementerian yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai lain yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi Jabatan.
5. Jabatan Struktural adalah dalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
6. Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian

- dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri, yang pengangkatan dalam jabatan tersebut dan kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
7. Kelas Jabatan adalah Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat Jabatan berdasarkan nilai suatu Jabatan.
 8. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai untuk meningkatkan kesejahteraan yang pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

BAB II

JABATAN DAN KELAS JABATAN

Pasal 2

- (1) Pegawai wajib melaksanakan tugas sesuai dengan jabatannya.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jabatan Struktural; dan
 - b. Jabatan Fungsional.
- (3) Selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat juga jabatan lainnya di lingkungan Kementerian.

Pasal 3

- (1) Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki Kelas Jabatan.
- (2) Daftar nama Jabatan dan Kelas Jabatan untuk Jabatan Struktural tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Daftar nama Jabatan dan Kelas Jabatan untuk Jabatan Fungsional tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Kelas Jabatan bagi Pejabat Struktural dan Fungsional didasarkan pada keputusan tentang pengangkatan, pemindahan, dan alih tugas dari dan dalam jabatan dimaksud.

BAB III

TUNJANGAN KINERJA

Pasal 5

Pegawai selain berhak menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan juga dapat diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulannya.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan kepada Pegawai berdasarkan Kelas Jabatan.
- (2) Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pemberian Tunjangan Kinerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan pemberian Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1862), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2020

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDUL HALIM ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

JABATAN DAN KELAS JABATAN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL DAN KELAS JABATANNYA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan
1	2	3
1	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	17
2	Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	17
3	Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	17
4	Kepala Biro Perencanaan	15
5	Kepala Bagian Perencanaan Umum	12
6	Kepala Subbagian Analisa Data Perencanaan	9
7	Kepala Subbagian Perencanaan Sekretariat Jenderal	9
8	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro	9
9	Kepala Bagian Penyusunan Program	12
10	Kepala Subbagian Penyusunan Program I	9

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan
1	2	3
11	Kepala Subbagian Penyusunan Program II	9
12	Kepala Subbagian Penyusunan Program III	9
13	Kepala Bagian Penyusunan Anggaran	12
14	Kepala Subbagian Penyusun Anggaran I	9
15	Kepala Subbagian Penyusun Anggaran II	9
16	Kepala Subbagian Penyusun Anggaran III	9
17	Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan	12
18	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan I	9
19	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan II	9
20	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan III	9
21	Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	15
22	Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran	12
23	Kepala Subbagian Pelaksanaan Anggaran I	9
24	Kepala Subbagian Pelaksanaan Anggaran II	9
25	Kepala Subbagian Pelaksanaan Anggaran III	9
26	Kepala Bagian Perbendaharaan dan Penatausahaan Keuangan	12
27	Kepala Subbagian Perbendaharaan	9
28	Kepala Subbagian Penatausahaan Keuangan	9
29	Kepala Subbagian Pengelolaan Gaji	9
30	Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan	12
31	Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	9
32	Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan BMN	9

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan
1	2	3
33	Kepala Subbagian Verifikasi dan Pembukuan	9
34	Kepala Bagian Penatausahaan Barang Milik Negara	12
35	Kepala Subbagian Administrasi Penatausahaan BMN	9
36	Kepala Subbagian Penghapusan BMN dan TPTGR	9
37	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro	9
38	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	15
39	Kepala Bagian Kepegawaian	12
40	Kepala Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	9
41	Kepala Subbagian Administrasi Pegawai	9
42	Kepala Subbagian Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai	9
43	Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol	12
44	Kepala Subbagian Tata Usaha Menteri	9
45	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal	9
46	Kepala Subbagian Tata Usaha Staf Ahli Menteri	9
47	Kepala Subbagian Persuratan dan Kearsipan	9
48	Kepala Subbagian Protokol	9
49	Kepala Bagian Pengadaan	12
50	Kepala Subbagian Standardisasi Pengadaan	9
51	Kepala Subbagian Pengelolaan Pengadaan	9
52	Kepala Subbagian Layanan Pengadaan	9
53	Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga	12
54	Kepala Subbagian Perlengkapan	9
55	Kepala Subbagian Pemeliharaan dan	9

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan
1	2	3
	Penyimpanan	
56	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro	9
57	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama	15
58	Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga	12
59	Kepala Subbagian Lembaga Negara dan Pemerintah	9
60	Kepala Subbagian Lembaga Swasta dan Organisasi Kemasyarakatan	9
61	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro	9
62	Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi	12
63	Kepala Subbagian Hubungan Media Massa	9
64	Kepala Subbagian Publikasi	9
65	Kepala Subbagian Analisis dan Evaluasi Media	9
66	Kepala Bagian Informasi dan Pelayanan Pengaduan	12
67	Kepala Subbagian Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	9
68	Kepala Subbagian Perpustakaan	9
69	Kepala Subbagian Layanan Pengaduan Masyarakat	9
70	Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri	12
71	Kepala Subbagian Kerjasama Bilateral	9
72	Kepala Subbagian Kerja Sama Multilateral	9
73	Kepala Subbagian Kerja Sama Lembaga Asing Non Pemerintah	9
74	Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana	15
75	Kepala Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	12
76	Kepala Subbagian Peraturan Perundang-Undangan I	9

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan
1	2	3
77	Kepala Subbagian Peraturan Perundang-Undangan II	9
78	Kepala Subbagian Peraturan Perundang-Undangan III	9
79	Kepala Bagian Pelayanan dan Advokasi Hukum	12
80	Kepala Subbagian Pelayanan dan Pertimbangan Hukum	9
81	Kepala Subbagian Advokasi Hukum	9
82	Kepala Subbagian Dokumentasi Hukum	9
83	Kepala Bagian Penelaahan, Evaluasi Produk Hukum dan Perjanjian	12
84	Kepala Subbagian Penelaahan Produk Hukum	9
85	Kepala Subbagian Evaluasi Produk Hukum	9
86	Kepala Subbagian Perjanjian	9
87	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	12
88	Kepala Subbagian Organisasi	9
89	Kepala Subbagian Tata Laksana	9
90	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro	9
91	Inspektur Jenderal	17
92	Sekretaris Inspektorat Jenderal	15
93	Kepala Bagian Program, Anggaran, dan Pelaporan	12
94	Kepala Subbagian Program dan Anggaran	9
95	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan	9
96	Kepala Bagian Analisa dan Pemantauan Hasil Pengawasan	12
97	Kepala Subbagian Analisa Hasil Pengawasan	9
98	Kepala Subbagian Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	9
99	Kepala Bagian Tata Usaha dan	12

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan
1	2	3
	Keuangan	
100	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
101	Kepala Subbagian Keuangan	9
102	Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum	12
103	Kepala Subbagian Kepegawaian	9
104	Kepala Subbagian Umum	9
105	Inspektur I	15
106	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
107	Inspektur II	15
108	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
109	Inspektur III	15
110	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
111	Inspektur IV	15
112	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
113	Inspektur V	15
114	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
115	Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan	17
116	Sekretaris Direktorat Jenderal	15
117	Kepala Bagian Perencanaan	12
118	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran	9
119	Kepala Subbagian Data dan Informasi	9
120	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan	9
121	Kepala Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara	12
122	Kepala Subbagian Pelaksanaan Anggaran	9
123	Kepala Subbagian Perbendaharaan	9
124	Kepala Subbagian Akuntansi dan Barang Milik Negara	9
125	Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum	12
126	Kepala Subbagian Kepegawaian	9
127	Kepala Subbagian Persuratan	9

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan
1	2	3
128	Kepala Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga	9
129	Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana	12
130	Kepala Subbagian Advokasi Hukum	9
131	Kepala Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang Undangan	9
132	Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana	9
133	Direktur Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan	14
134	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
135	Kepala Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Wilayah I	11
136	Kepala Seksi Perencanaan Program	9
137	Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan	9
138	Kepala Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Wilayah II	11
139	Kepala Seksi Perencanaan Program	9
140	Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan	9
141	Kepala Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Wilayah III	11
142	Kepala Seksi Perencanaan Program	9
143	Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan	9
144	Kepala Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Wilayah IV	11
145	Kepala Seksi Perencanaan Program	9
146	Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan	9
147	Kepala Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Wilayah V	11
148	Kepala Seksi Perencanaan Program	9
149	Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan	9
150	Direktur Pembangunan Sarana dan	14

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan
1	2	3
	Prasarana Kawasan Perdesaan	
151	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
152	Kepala Subdirektorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah I	11
153	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Ekonomi	9
154	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar	9
155	Kepala Subdirektorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah II	11
156	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Ekonomi	9
157	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar	9
158	Kepala Subdirektorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah III	11
159	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Ekonomi	9
160	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar	9
161	Kepala Subdirektorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah IV	11
162	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Ekonomi	9
163	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar	9
164	Kepala Subdirektorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah V	11
165	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Ekonomi	9
166	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar	9
167	Direktur Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan	14
168	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
169	Kepala Subdirektorat Analisa Kebijakan Ekonomi Kawasan Perdesaan	11
170	Kepala Seksi Analisa Kebijakan	9

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan
1	2	3
	Pemanfaatan Hutan	
171	Kepala Seksi Analisa Kebijakan Pertambangan	9
172	Kepala Subdirektorat Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi	11
173	Kepala Seksi Sinkronisasi Program Pemerintah	9
174	Kepala Seksi Penyiapan Potensi Masyarakat	9
175	Kepala Subdirektorat Pengembangan Permodalan dan Investasi	11
176	Kepala Seksi Pengembangan Permodalan	9
177	Kepala Seksi Pengembangan Investasi	9
178	Kepala Subdirektorat Pengembangan Fasilitas Usaha dan Pemasaran	11
179	Kepala Seksi Pengembangan Fasilitas Usaha Ekonomi	9
180	Kepala Seksi Pengembangan Fasilitas Pemasaran	9
181	Direktur Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan	14
182	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
183	Kepala Subdirektorat Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan Wilayah I	11
184	Kepala Seksi Identifikasi dan Pemetaan Potensi	9
185	Kepala Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi	9
186	Kepala Subdirektorat Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan Wilayah II	11
187	Kepala Seksi Identifikasi dan Pemetaan Potensi	9
188	Kepala Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi	9
189	Kepala Subdirektorat Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan Wilayah III	11

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan
1	2	3
190	Kepala Seksi Identifikasi dan Pemetaan Potensi	9
191	Kepala Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi	9
192	Kepala Subdirektorat Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan Wilayah IV	11
193	Kepala Seksi Identifikasi dan Pemetaan Potensi	9
194	Kepala Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi	9
195	Kepala Subdirektorat Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan Wilayah V	11
196	Kepala Seksi Identifikasi dan Pemetaan Potensi	9
197	Kepala Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi	9
198	Direktur Kerja Sama dan Pengembangan Kapasitas	14
199	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
200	Kepala Subdirektorat Pendampingan Manajemen dan Teknis	11
201	Kepala Seksi Penyiapan Pendampingan Manajemen	9
202	Kepala Seksi Pendampingan Teknis	9
203	Kepala Subdirektorat Penyiapan Media dan Pembelajaran	11
204	Kepala Seksi Penyiapan Media	9
205	Kepala Seksi Pembelajaran	9
206	Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Kemitraan	11
207	Kepala Seksi Kerjasama Antar Lembaga	9
208	Kepala Seksi Kemitraan Usaha	9
209	Kepala Subdirektorat Keserasian Kawasan Perdesaan	11
210	Kepala Seksi Identifikasi	9
211	Kepala Seksi Fasilitas	9

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan
1	2	3
212	Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	17
213	Sekretaris Direktorat Jenderal	15
214	Kepala Bagian Perencanaan	12
215	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran	9
216	Kepala Subbagian Data dan Informasi	9
217	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan	9
218	Kepala Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara	12
219	Kepala Subbagian Pelaksanaan Anggaran	9
220	Kepala Subbagian Pembendaharaan	9
221	Kepala Subbagian Akuntansi dan Barang Milik Negara	9
222	Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum	12
223	Kepala Subbagian Kepegawaian	9
224	Kepala Subbagian Persuratan	9
225	Kepala Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga	9
226	Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana	12
227	Kepala Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	9
228	Kepala Subbagian Advokasi Hukum	9
229	Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana	9
230	Direktur Pelayanan Sosial Dasar	14
231	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
232	Kepala Subdirektorat Pelayanan Dasar	11
233	Kepala Seksi Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Desa	9
234	Kepala Seksi Fasilitasi Pelayanan Pendidikan Desa	9
235	Kepala Subdirektorat Kesejahteraan Masyarakat	11

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan
1	2	3
236	Kepala Seksi Fasilitasi Kesejahteraan Perempuan dan Anak	9
237	Kepala Seksi Fasilitasi Kesejahteraan Sosial	9
238	Kepala Subdirektorat Adat dan Budaya	11
239	Kepala Seksi Fasilitasi Adat dan Kearifan Lokal	9
240	Kepala Seksi Fasilitasi Seni dan Budaya	9
241	Kepala Subdirektorat Perlindungan Sosial	11
242	Kepala Seksi Kerukunan dan Ketentraman Desa	9
243	Kepala Seksi Penanganan Konflik Sosial Desa	9
244	Kepala Subdirektorat Pengembangan Akses Informasi Masyarakat	11
245	Kepala Seksi Fasilitasi Pengembangan Media Informasi	9
246	Kepala Seksi Pengelolaan Akses Informasi	9
247	Direktur Pengembangan Usaha Ekonomi Desa	14
248	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
249	Kepala Subdirektorat Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa	11
250	Kepala Seksi Fasilitasi Pembentukan BUM Desa	9
251	Kepala Seksi Fasilitasi Pelembagaan BUM Desa	9
252	Kepala Subdirektorat Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Desa	11
253	Kepala Seksi Fasilitasi Pengembangan Usaha BUM Desa	9
254	Kepala Seksi Fasilitasi Pemasaran Hasil Usaha BUM Desa	9
255	Kepala Subdirektorat Perdagangan Desa	11
256	Kepala Seksi Fasilitasi Pengembangan Pasar Desa	9

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan
1	2	3
257	Kepala Seksi Fasilitasi Pengembangan Jaringan Pemasaran	9
258	Kepala Subdirektorat Permodalan Ekonomi Desa	11
259	Kepala Seksi Fasilitasi Permodalan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Desa	9
260	Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Kredit Mikro	9
261	Kepala Subdirektorat Usaha Ekonomi Masyarakat Desa	11
262	Kepala Seksi Fasilitasi Tata Kelola Ekonomi Desa	9
263	Kepala Seksi Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Desa	9
264	Direktur Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	14
265	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
266	Kepala Subdirektorat Sumber Daya Hutan, Pertanian dan Pertambangan	11
267	Kepala Seksi Fasilitasi Pendayagunaan Sumber Daya Hutan dan Pertanian	9
268	Kepala Seksi Fasilitasi Pendayagunaan Sumber Daya Pertambangan	9
269	Kepala Subdirektorat Sumber Daya Air, Pertanahan dan Maritim	11
270	Kepala Seksi Fasilitasi Pendayagunaan Sumber Daya Air dan Pertanahan	9
271	Kepala Seksi Fasilitasi Pendayagunaan Sumber Daya Pesisir dan Kelautan	9
272	Kepala Subdirektorat Lingkungan Hidup	11
273	Kepala Seksi Fasilitasi Rehabilitasi Lingkungan Hidup Desa	9
274	Kepala Seksi Fasilitasi Konservasi Lingkungan Hidup Desa	9
275	Kepala Subdirektorat Teknologi Tepat Guna	11
276	Kepala Seksi Fasilitasi Inovasi dan Promosi Teknologi Tepat Guna	9

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan
1	2	3
277	Kepala Seksi Pemetaan dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna	9
278	Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa	14
279	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
280	Kepala Subdirektorat Sarana dan Prasarana Permukiman Desa	11
281	Kepala Seksi Fasilitasi Pembangunan Permukiman Desa	9
282	Kepala Seksi Fasilitasi Pembangunan Lingkungan Permukiman Desa	9
283	Kepala Subdirektorat Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	11
284	Kepala Seksi Fasilitasi Sarana Transportasi Desa	9
285	Kepala Seksi Fasilitasi Prasarana Transportasi Desa	9
286	Kepala Subdirektorat Sarana dan Prasarana Pendukung Ekonomi Desa	11
287	Kepala Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Produksi	9
288	Kepala Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pemasaran	9
289	Kepala Subdirektorat Sarana dan Prasarana Elektrifikasi Desa	11
290	Kepala Seksi Fasilitasi Pembangunan Sarana Elektrifikasi Desa	9
291	Kepala Seksi Fasilitasi Pembangunan Prasarana Elektrifikasi Desa	9
292	Kepala Subdirektorat Sarana dan Prasarana Telekomunikasi Desa	11
293	Kepala Seksi Fasilitasi Sarana Telekomunikasi Desa	9
294	Kepala Seksi Fasilitasi Prasarana Telekomunikasi Desa	9
295	Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa	14
296	Kepala Subbagian Tata Usaha	9

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan
1	2	3
297	Kepala Subdirektorat Pengembangan Kapasitas Masyarakat Desa	11
298	Kepala Seksi Fasilitasi Pembelajaran Masyarakat Desa	9
299	Kepala Seksi Pendampingan dan Kaderisasi Masyarakat Desa	9
300	Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Pembangunan Partisipatif	11
301	Kepala Seksi Fasilitasi Perencanaan Partisipatif	9
302	Kepala Seksi Fasilitasi Pembangunan Partisipatif	9
303	Kepala Subdirektorat Advokasi Peraturan Desa	11
304	Kepala Seksi Analisis dan Penyusunan Peraturan Desa	9
305	Kepala Seksi Advokasi Kewenangan dan Peraturan Desa	9
306	Kepala Subdirektorat Ketahanan Masyarakat Desa	11
307	Kepala Seksi Fasilitasi Advokasi Hukum	9
308	Kepala Seksi Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa	9
309	Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Kemitraan Masyarakat Desa	11
310	Kepala Seksi Fasilitasi Kerja Sama Desa	9
311	Kepala Seksi Fasilitasi Kemitraan	9
312	Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi	17
313	Sekretaris Direktorat Jenderal	15
314	Kepala Bagian Perencanaan	12
315	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran	9
316	Kepala Subbagian Data dan Informasi	9
317	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan	9
318	Kepala Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara	12

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan
1	2	3
319	Kepala Subbagian Pelaksanaan Anggaran	9
320	Kepala Subbagian Perbendaharaan	9
321	Kepala Subbagian Akuntansi dan Barang Milik Negara	9
322	Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum	12
323	Kepala Subbagian Kepegawaian	9
324	Kepala Subbagian Persuratan	9
325	Kepala Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga	9
326	Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana	12
327	Kepala Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	9
328	Kepala Subbagian Advokasi Hukum	9
329	Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana	9
330	Direktur Promosi dan Kemitraan	14
331	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
332	Kepala Subdirektorat Promosi dan Publikasi	11
333	Kepala Seksi Promosi	9
334	Kepala Seksi Publikasi	9
335	Kepala Subdirektorat Kemitraan Badan Usaha	11
336	Kepala Seksi Fasilitasi Kemitraan Badan Usaha	9
337	Kepala Seksi Evaluasi Kemitraan Badan Usaha	9
338	Kepala Subdirektorat Kemitraan Masyarakat	11
339	Kepala Seksi Fasilitasi Kemitraan Masyarakat	9
340	Kepala Seksi Evaluasi Kemitraan Masyarakat	9
341	Kepala Subdirektorat Kemitraan Kelembagaan Pemerintah	11

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan
1	2	3
342	Kepala Seksi Fasilitasi Kemitraan Kelembagaan Pemerintah	9
343	Kepala Seksi Evaluasi Kemitraan Kelembagaan Pemerintah	9
344	Direktur Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi	14
345	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
346	Kepala Subdirektorat Pembangunan dan Pengembangan Sarana Permukiman dan Kawasan	11
347	Kepala Seksi Pembangunan dan Pengembangan Sarana Permukiman	9
348	Kepala Seksi Pembangunan dan Pengembangan Sarana Kawasan	9
349	Kepala Subdirektorat Pengembangan Prasarana Permukiman dan Kawasan	11
350	Kepala Seksi Pengembangan Prasarana Permukiman	9
351	Kepala Seksi Pengembangan Prasarana Kawasan	9
352	Kepala Subdirektorat Penyerasian Lingkungan	11
353	Kepala Seksi Rencana Penyerasian Lingkungan	9
354	Kepala Seksi Mitigasi Lingkungan	9
355	Kepala Subdirektorat Evaluasi Perkembangan Permukiman dan Kawasan	11
356	Kepala Seksi Evaluasi Perkembangan Permukiman	9
357	Kepala Seksi Evaluasi Perkembangan Kawasan	9
358	Kepala Subdirektorat Standardisasi Sarana dan Prasarana	11
359	Kepala Seksi Standardisasi Sarana	9
360	Kepala Seksi Standardisasi Prasarana	9
361	Direktur Pengembangan Usaha Transmigrasi	14

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan
1	2	3
362	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
363	Kepala Subdirektorat Produksi	11
364	Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan	9
365	Kepala Seksi Produksi Non Tanaman Pangan	9
366	Kepala Subdirektorat Pengolahan dan Pemasaran	11
367	Kepala Seksi Pengolahan Hasil	9
368	Kepala Seksi Pemasaran Hasil	9
369	Kepala Subdirektorat Lembaga Ekonomi dan Permodalan	11
370	Kepala Seksi Lembaga Ekonomi	9
371	Kepala Seksi Permodalan	9
372	Kepala Subdirektorat Kewirausahaan	11
373	Kepala Seksi Pengembangan Wirausaha	9
374	Kepala Seksi Kemitraan Usaha	9
375	Direktur Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi	14
376	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
377	Kepala Subdirektorat Pangan dan Kesehatan	11
378	Kepala Seksi Pangan	9
379	Kepala Seksi Kesehatan	9
380	Kepala Subdirektorat Fasilitasi Pendidikan	11
381	Kepala Seksi Fasilitasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar	9
382	Kepala Seksi Fasilitasi Pendidikan Menengah dan Perguruan Tinggi	9
383	Kepala Subdirektorat Fasilitasi Mental Spiritual dan Seni Budaya	11
384	Kepala Seksi Fasilitasi Mental Spiritual	9
385	Kepala Seksi Fasilitasi Seni Budaya	9
386	Kepala Subdirektorat Bina Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat	11
387	Kepala Seksi Kelembagaan Pemerintah	9

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan
1	2	3
388	Kepala Seksi Kelembagaan Masyarakat	9
389	Direktur Pelayanan Pertanahan Transmigrasi	14
390	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
391	Kepala Subdirektorat Pengukuran Bidang Tanah	11
392	Kepala Seksi Pengukuran dan Pembagian Tanah	9
393	Kepala Seksi Pengukuran Tata Batas	9
394	Kepala Subdirektorat Pengurusan Hak Atas Tanah	11
395	Kepala Seksi Inventarisasi Kepemilikan Tanah	9
396	Kepala Seksi Legalitas Hak Atas Tanah	9
397	Kepala Subdirektorat Advokasi Pertanahan	11
398	Kepala Seksi Identifikasi Masalah Pertanahan	9
399	Kepala Seksi Rekognisi dan Kompensasi	9
400	Kepala Subdirektorat Dokumentasi Pelayanan Pertanahan	11
401	Kepala Seksi Pengolahan Data	9
402	Kepala Seksi Penyajian Informasi dan Pelaporan	9
403	Direktur Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	17
404	Sekretaris Direktorat Jenderal	15
405	Kepala Bagian Perencanaan	12
406	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran	9
407	Kepala Subbagian Data dan Informasi	9
408	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan	9
409	Kepala Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara	12
410	Kepala Subbagian Pelaksanaan Anggaran	9

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan
1	2	3
411	Kepala Subbagian Perbendaharaan	9
412	Kepala Subbagian Akuntansi dan Barang Milik Negara	9
413	Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum	12
414	Kepala Subbagian Kepegawaian	9
415	Kepala Subbagian Persuratan	9
416	Kepala Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga	9
417	Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana	12
418	Kepala Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	9
419	Kepala Subbagian Advokasi Hukum	9
420	Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana	9
421	Direktur Bina Potensi Kawasan Transmigrasi	14
422	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
423	Kepala Subdirektorat Identifikasi dan Informasi Potensi Kawasan	11
424	Kepala Seksi Identifikasi Kawasan	9
425	Kepala Seksi Informasi Potensi Kawasan	9
426	Kepala Subdirektorat Advokasi Kawasan	11
427	Kepala Seksi Penyiapan Bahan Advokasi	9
428	Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan	9
429	Kepala Subdirektorat Perencanaan Kawasan	11
430	Kepala Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data	9
431	Kepala Seksi Penyusunan Rencana Kawasan	9
432	Kepala Subdirektorat Fasilitasi Penetapan Kawasan	11
433	Kepala Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data	9
434	Kepala Seksi Penilaian Kawasan	9

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan
1	2	3
435	Kepala Subdirektorat Mediasi dan Kerja Sama Antar Daerah	11
436	Kepala Seksi Mediasi Antar Daerah	9
437	Kepala Seksi Kerja Sama Antar Daerah	9
438	Direktur Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	14
439	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
440	Kepala Subdirektorat Perencanaan Teknis Satuan Kawasan Pengembangan	11
441	Kepala Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data	9
442	Kepala Seksi Penyusunan Rencana Satuan Kawasan Pengembangan	9
443	Kepala Subdirektorat Perencanaan Teknis Satuan Permukiman	11
444	Kepala Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data	9
445	Kepala Seksi Penyusunan Rencana Satuan Permukiman	9
446	Kepala Subdirektorat Perencanaan Sarana dan Prasarana Kawasan	11
447	Kepala Seksi Perencanaan Sarana	9
448	Kepala Seksi Perencanaan Prasarana	9
449	Kepala Subdirektorat Perencanaan Pengembangan Masyarakat	11
450	Kepala Seksi Perencanaan Pengembangan Ekonomi	9
451	Kepala Seksi Perencanaan Pengembangan Sosial Budaya	9
452	Direktur Penyediaan Tanah Transmigrasi	14
453	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
454	Kepala Subdirektorat Fasilitasi Pencadangan Tanah	11
455	Kepala Seksi Identifikasi Status dan Penggunaan Tanah	9
456	Kepala Seksi Pengurusan Status Tanah	9

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan
1	2	3
457	Kepala Subdirektorat Identifikasi dan Penataan Tanah	11
458	Kepala Seksi Identifikasi Penggunaan dan Pemilikan Tanah	9
459	Kepala Seksi Penataan Penggunaan dan Pemilikan Tanah	9
460	Kepala Subdirektorat Pengelolaan Tanah	11
461	Kepala Seksi Pengurusan Hak Pengelolaan Lahan	9
462	Kepala Seksi Pemeliharaan Hak Pengelolaan Lahan	9
463	Kepala Subdirektorat Dokumentasi Penyediaan Tanah	11
464	Kepala Seksi Pengolahan Data	9
465	Kepala Seksi Penyajian Informasi dan Pelaporan	9
466	Direktur Pembangunan Permukiman Transmigrasi	14
467	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
468	Kepala Subdirektorat Penyiapan dan Evaluasi Lahan Permukiman	11
469	Kepala Seksi Penyiapan Lahan	9
470	Kepala Seksi Evaluasi Penyiapan Lahan	9
471	Kepala Subdirektorat Penyiapan dan Evaluasi Sarana Permukiman	11
472	Kepala Seksi Penyiapan Sarana	9
473	Kepala Seksi Evaluasi Penyiapan Sarana	9
474	Kepala Subdirektorat Penyiapan dan Evaluasi Prasarana Permukiman	11
475	Kepala Seksi Penyiapan Prasarana	9
476	Kepala Seksi Evaluasi Penyiapan Prasarana	9
477	Kepala Subdirektorat Kelayakan Permukiman	11
478	Kepala Seksi Evaluasi Kelayakan	9
479	Kepala Seksi Perwujudan Ruang	9

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan
1	2	3
480	Direktur Penataan Persebaran Penduduk	14
481	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
482	Kepala Subdirektorat Penyiapan Perpindahan	11
483	Kepala Seksi Penyerasian Perpindahan	9
484	Kepala Seksi Administrasi Perpindahan	9
485	Kepala Subdirektorat Penyiapan Calon Transmigran dan Penduduk Setempat	11
486	Kepala Seksi Pendaftaran dan Seleksi	9
487	Kepala Seksi Keterampilan Calon Transmigran dan Penduduk Setempat	9
488	Kepala Subdirektorat Pelayanan Perpindahan	11
489	Kepala Seksi Penampungan dan Perbekalan	9
490	Kepala Seksi Pengangkutan	9
491	Kepala Subdirektorat Penataan dan Adaptasi	11
492	Kepala Seksi Penataan	9
493	Kepala Seksi Adaptasi	9
494	Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal	17
495	Sekretaris Direktorat Jenderal	15
496	Kepala Bagian Perencanaan	12
497	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran	9
498	Kepala Subbagian Data dan Informasi	9
499	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan	9
500	Kepala Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara	12
501	Kepala Subbagian Pelaksanaan Anggaran	9
502	Kepala Subbagian Perbendaharaan	9
503	Kepala Subbagian Akuntansi dan Barang Milik Negara	9

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan
1	2	3
504	Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum	12
505	Kepala Subbagian Kepegawaian	9
506	Kepala Subbagian Persuratan	9
507	Kepala Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga	9
508	Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana	12
509	Kepala Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	9
510	Kepala Subbagian Advokasi Hukum	9
511	Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana	9
512	Direktur Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal	14
513	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
514	Kepala Subdirektorat Penyusunan Indikator Daerah Tertinggal	11
515	Kepala Seksi Pengumpulan dan Analisis	9
516	Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian	9
517	Kepala Subdirektorat Identifikasi Daerah Tertinggal	11
518	Kepala Seksi Pengumpulan dan Analisis	9
519	Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian	9
520	Kepala Subdirektorat Penyusunan Rencana dan Skema Pendanaan Kementerian/Lembaga	11
521	Kepala Seksi Penyusunan Rencana	9
522	Kepala Seksi Skema Pendanaan	9
523	Kepala Subdirektorat Penyusunan Rencana dan Skema Pendanaan Daerah	11
524	Kepala Seksi Penyusunan Rencana	9
525	Kepala Seksi Skema Pendanaan	9
526	Kepala Subdirektorat Evaluasi dan Pelaporan	11
527	Kepala Seksi Evaluasi	9
528	Kepala Seksi Pelaporan	9
529	Direktur Pengembangan Sumber Daya	14

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan
1	2	3
	Manusia	
530	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
531	Kepala Subdirektorat Pendidikan	11
532	Kepala Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia	9
533	Kepala Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana	9
534	Kepala Subdirektorat Kesehatan	11
535	Kepala Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia	9
536	Kepala Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana	9
537	Kepala Subdirektorat Keterampilan	11
538	Kepala Seksi Peningkatan Kualitas	9
539	Kepala Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana	9
540	Kepala Subdirektorat Tenaga Kerja	11
541	Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja	9
542	Kepala Seksi Peningkatan Kesempatan Kerja	9
543	Kepala Subdirektorat Inovasi dan Penerapan Teknologi	11
544	Kepala Seksi Inovasi	9
545	Kepala Seksi Penerapan Teknologi	9
546	Direktur Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup	14
547	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
548	Kepala Subdirektorat Sumber Daya Hayati	11
549	Kepala Seksi Sumber Daya Hayati Berbasis Daratan	9
550	Kepala Seksi Sumber Daya Hayati Berbasis Maritim	9
551	Kepala Subdirektorat Tata Guna Lahan	11
552	Kepala Seksi Perencanaan Tata Guna Lahan	9

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan
1	2	3
553	Kepala Seksi Pendayagunaan Tata Guna Lahan	9
554	Kepala Subdirektorat Pariwisata	11
555	Kepala Seksi Pengembangan Potensi Pariwisata	9
556	Kepala Seksi Promosi Pariwisata	9
557	Kepala Subdirektorat Sumber Daya Energi	11
558	Kepala Seksi Pemanfaatan Energi Terbarukan	9
559	Kepala Seksi Pemanfaatan Energi Non Terbarukan	9
560	Kepala Subdirektorat Lingkungan Hidup	11
561	Kepala Seksi Pelestarian Lingkungan Hidup	9
562	Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	9
563	Direktur Peningkatan Sarana dan Prasarana	14
564	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
565	Kepala Subdirektorat Sarana dan Prasarana Transportasi	11
566	Kepala Seksi Transportasi Darat	9
567	Kepala Seksi Transportasi Laut dan Udara	9
568	Kepala Subdirektorat Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Permukiman	11
569	Kepala Seksi Air Bersih	9
570	Kepala Seksi Permukiman	9
571	Kepala Subdirektorat Sarana dan Prasarana Ekonomi	11
572	Kepala Seksi Industri dan Perdagangan	9
573	Kepala Seksi Pertanian, Kelautan dan Perikanan	9
574	Kepala Subdirektorat Sarana dan Prasarana Energi	11
575	Kepala Seksi Energi Baru Terbarukan	9

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan
1	2	3
	Nabati	
576	Kepala Seksi Energi Baru Terbarukan Non Nabati	9
577	Kepala Subdirektorat Sarana dan Prasarana Informasi dan Telekomunikasi	11
578	Kepala Seksi Jaringan Informasi	9
579	Kepala Seksi Jaringan Telekomunikasi	9
580	Direktur Pengembangan Ekonomi Lokal	14
581	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
582	Kepala Subdirektorat Investasi dan Permodalan	11
583	Kepala Seksi Investasi	9
584	Kepala Seksi Permodalan	9
585	Kepala Subdirektorat Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	11
586	Kepala Seksi Koperasi	9
587	Kepala Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	9
588	Kepala Subdirektorat Potensi Produk Unggulan	11
589	Kepala Seksi Identifikasi dan Analisis Potensi Produk Unggulan	9
590	Kepala Seksi Pengembangan Produk Unggulan	9
591	Kepala Subdirektorat Kemitraan Usaha	11
592	Kepala Seksi Identifikasi Usaha	9
593	Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan	9
594	Kepala Subdirektorat Industri, Distribusi, dan Pemasaran	11
595	Kepala Seksi Industri	9
596	Kepala Seksi Distribusi dan Pemasaran	9
597	Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu	17
598	Sekretaris Direktorat Jenderal	15
599	Kepala Bagian Perencanaan	12
600	Kepala Subbagian Penyusunan Program	9

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan
1	2	3
	dan Anggaran	
601	Kepala Subbagian Data dan Informasi	9
602	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan	9
603	Kepala Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara	12
604	Kepala Subbagian Pelaksanaan Anggaran	9
605	Kepala Subbagian Perbendaharaan	9
606	Kepala Subbagian Akuntansi dan Barang Milik Negara	9
607	Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum	12
608	Kepala Subbagian Kepegawaian	9
609	Kepala Subbagian Persuratan	9
610	Kepala Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga	9
611	Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana	12
612	Kepala Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	9
613	Kepala Subbagian Advokasi Hukum	9
614	Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana	9
615	Direktur Pengembangan Daerah Rawan Pangan	14
616	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
617	Kepala Subdirektorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan Wilayah I	11
618	Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya	9
619	Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur	9
620	Kepala Subdirektorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan Wilayah II	11
621	Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya	9
622	Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur	9

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan
1	2	3
623	Kepala Subdirektorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan Wilayah III	11
624	Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya	9
625	Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur	9
626	Kepala Subdirektorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan Wilayah IV	11
627	Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya	9
628	Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur	9
629	Kepala Subdirektorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan Wilayah V	11
630	Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya	9
631	Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur	9
632	Direktur Pengembangan Daerah Perbatasan	14
633	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
634	Kepala Subdirektorat Daerah Perbatasan Wilayah I	11
635	Kepala Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya	9
636	Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Dasar	9
637	Kepala Subdirektorat Daerah Perbatasan Wilayah II	11
638	Kepala Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya	9
639	Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Dasar	9
640	Kepala Subdirektorat Daerah Perbatasan Wilayah III	11
641	Kepala Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya	9
642	Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Dasar	9

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan
1	2	3
643	Kepala Subdirektorat Daerah Perbatasan Wilayah IV	11
644	Kepala Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya	9
645	Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Dasar	9
646	Kepala Subdirektorat Daerah Perbatasan Wilayah V	11
647	Kepala Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya	9
648	Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Dasar	9
649	Direktur Penanganan Daerah Rawan Bencana	14
650	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
651	Kepala Subdirektorat Penanganan Daerah Rawan Bencana Wilayah I	11
652	Kepala Seksi Pengurangan Resiko Bencana	9
653	Kepala Seksi Penanganan Pasca Bencana	9
654	Kepala Subdirektorat Penanganan Daerah Rawan Bencana Wilayah II	11
655	Kepala Seksi Pengurangan Resiko Bencana	9
656	Kepala Seksi Penanganan Pasca Bencana	9
657	Kepala Subdirektorat Penanganan Daerah Rawan Bencana Wilayah III	11
658	Kepala Seksi Pengurangan Resiko Bencana	9
659	Kepala Seksi Penanganan Pasca Bencana	9
660	Kepala Subdirektorat Penanganan Daerah Rawan Bencana Wilayah IV	11
661	Kepala Seksi Pengurangan Resiko Bencana	9
662	Kepala Seksi Penanganan Pasca Bencana	9

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan
1	2	3
663	Kepala Subdirektorat Penanganan Daerah Rawan Bencana Wilayah V	11
664	Kepala Seksi Pengurangan Resiko Bencana	9
665	Kepala Seksi Penanganan Pasca Bencana	9
666	Direktur Penanganan Daerah Pasca Konflik	14
667	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
668	Kepala Subdirektorat Penanganan Daerah Pasca Konflik Wilayah I	11
669	Kepala Seksi Pencegahan	9
670	Kepala Seksi Pemulihan	9
671	Kepala Subdirektorat Penanganan Daerah Pasca Konflik Wilayah II	11
672	Kepala Seksi Pencegahan	9
673	Kepala Seksi Pemulihan	9
674	Kepala Subdirektorat Penanganan Daerah Pasca Konflik Wilayah III	11
675	Kepala Seksi Pencegahan	9
676	Kepala Seksi Pemulihan	9
677	Kepala Subdirektorat Penanganan Daerah Pasca Konflik Wilayah IV	11
678	Kepala Seksi Pencegahan	9
679	Kepala Seksi Pemulihan	9
680	Kepala Subdirektorat Penanganan Daerah Pasca Konflik Wilayah V	11
681	Kepala Seksi Pencegahan	9
682	Kepala Seksi Pemulihan	9
683	Direktur Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar	14
684	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
685	Kepala Subdirektorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah I	11
686	Kepala Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya	9

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan
1	2	3
687	Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana	9
688	Kepala Subdirektorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah II	11
689	Kepala Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya	9
690	Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana	9
691	Kepala Subdirektorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah III	11
692	Kepala Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya	9
693	Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana	9
694	Kepala Subdirektorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah IV	11
695	Kepala Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya	9
696	Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana	9
697	Kepala Subdirektorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah V	11
698	Kepala Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya	9
699	Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana	9
700	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi	17
701	Sekretaris Badan	15
702	Kepala Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan	12
703	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran	9
704	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan	9

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan
1	2	3
705	Kepala Bagian Keuangan dan BMN	12
706	Kepala Subbagian Pelaksanaan Anggaran	9
707	Kepala Subbagian Perbendaharaan	9
708	Kepala Subbagian Akuntansi dan Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara	9
709	Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum	12
710	Kepala Subbagian Kepegawaian	9
711	Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana	9
712	Kepala Subbagian Umum	9
713	Kepala Pusat Pelatihan Masyarakat	14
714	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
715	Kepala Bidang Program dan Materi	12
716	Kepala Subbidang Program dan Evaluasi	9
717	Kepala Subbidang Penyusunan Materi	9
718	Kepala Bidang Standardisasi	12
719	Kepala Subbidang Penyusunan Standar	9
720	Kepala Subbidang Penerapan Standar	9
721	Kepala Bidang Kerja Sama dan Pemberdayaan	12
722	Kepala Subbidang Kerja Sama	9
723	Kepala Subbidang Pemberdayaan	9
724	Kepala Pusat Data dan Informasi	14
725	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
726	Kepala Bidang Desa	12
727	Kepala Subbidang Pengumpulan dan Pengolahan Data	9
728	Kepala Subbidang Penyajian Informasi	9
729	Kepala Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	12
730	Kepala Subbidang Pengumpulan dan Pengolahan Data	9
731	Kepala Subbidang Penyajian Informasi	9

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan
1	2	3
732	Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Sumber Daya Informatika	12
733	Kepala Subbidang Pengembangan Sistem Informasi	9
734	Kepala Subbidang Sumber Daya Informatika	9
735	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan	14
736	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
737	Kepala Bidang Desa	12
738	Kepala Subbidang Perencanaan dan Pelaporan	9
739	Kepala Subbidang Diseminasi	9
740	Kepala Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal	12
741	Kepala Subbidang Perencanaan dan Pelaporan	9
742	Kepala Subbidang Diseminasi	9
743	Kepala Bidang Transmigrasi	12
744	Kepala Subbidang Perencanaan dan Pelaporan	9
745	Kepala Subbidang Diseminasi	9
746	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara	14
747	Kepala Bagian Tata Usaha	12
748	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Keuangan	9
749	Kepala Subbagian Umum	9
750	Kepala Bidang Program Kerja Sama dan Evaluasi	12
751	Kepala Subbidang Program dan Kerjasama	9
752	Kepala Subbidang Evaluasi dan Pelaporan	9
753	Kepala Bidang Penyelenggaraan	12
754	Kepala Subbidang Diklat Manajemen dan Struktural	9

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan
1	2	3
755	Kepala Subbidang Diklat Teknis dan Fungsional	9
756	Kepala Balai Besar Pengembangan Latihan Masyarakat Jakarta	14
757	Kepala Bagian Tata Usaha	12
758	Kepala Subbagian Keuangan	9
759	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum	9
760	Kepala Bidang Program, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	11
761	Kepala Seksi Program Pelatihan	9
762	Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	9
763	Kepala Bidang Penyelenggaraan	11
764	Kepala Seksi Pelatihan Masyarakat Desa	9
765	Kepala Seksi Pelatihan Masyarakat Daerah Tertinggal, Daerah Tertentu dan Transmigrasi	9
766	Kepala Balai Besar Latihan Masyarakat Yogyakarta	14
767	Kepala Bagian Tata Usaha	12
768	Kepala Subbagian Keuangan	9
769	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum	9
770	Kepala Bidang Program, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	11
771	Kepala Seksi Program Pelatihan	9
772	Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	9
773	Kepala Bidang Penyelenggaraan	11
774	Kepala Seksi Pelatihan Masyarakat Desa	9
775	Kepala Seksi Pelatihan Masyarakat Daerah Tertinggal, Daerah Tertentu dan Transmigrasi	9
776	Kepala Balai Latihan Masyarakat Pekanbaru	13

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan
1	2	3
777	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
778	Kepala Seksi Program, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	9
779	Kepala Seksi Penyelenggaraan	9
780	Kepala Balai Latihan Masyarakat Denpasar	13
781	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
782	Kepala Seksi Program, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	9
783	Kepala Seksi Penyelenggaraan	9
784	Kepala Balai Latihan Masyarakat Banjarmasin	13
785	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
786	Kepala Seksi Program, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	9
787	Kepala Seksi Penyelenggaraan	9
788	Kepala Balai Latihan Masyarakat Makassar	13
789	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
790	Kepala Seksi Program, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	9
791	Kepala Seksi Penyelenggaraan	9
792	Kepala Balai Pengkajian dan Penerapan Teknik Produksi Bengkulu	13
793	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
794	Kepala Seksi Program dan Evaluasi	9
795	Kepala Seksi Penyelenggaraan dan Kerja Sama	9
796	Kepala Balai Latihan Masyarakat Ambon	13
797	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
798	Kepala Seksi Program, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	9
799	Kepala Seksi Penyelenggaraan	9
800	Kepala Balai Latihan Masyarakat Jayapura	13
801	Kepala Subbagian Tata Usaha	9

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan
1	2	3
802	Kepala Seksi Program, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	9
803	Kepala Seksi Penyelenggaraan	9

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDUL HALIM ISKANDAR

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

JABATAN DAN KELAS JABATAN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASIDAFTAR NAMA JABATAN DAN KELAS JABATANNYA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
1	2	3
1	Staf Ahli Bidang Pengembangan Wilayah pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	16
2	Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	16
3	Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	16
4	Staf Ahli Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	16
5	Staf Ahli Bidang Hukum pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	16
6	Staf Khusus Menteri Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	16
7	Staf Khusus Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	16

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
1	2	3
8	Staf Khusus Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	16

DAFTAR NAMA JABATAN PELAKSANA DAN KELAS JABATANNYA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

No.	Nama Jabatan Pelaksana	Kelas Jabatan
1	2	3
1.	Analisis Aplikasi Data Sistem Keuangan	7
2.	Analisis Barang dan Jasa	7
3.	Analisis Barang Milik Negara	7
4.	Analisis Bencana	7
5.	Analisis Bidang Pengawasan	7
6.	Analisis Data	7
7.	Analisis Data dan Informasi	7
8.	Analisis Diklat	7
9.	Analisis Ekonomi	7
10.	Analisis Evaluasi dan Laporan	7
11.	Analisis Hukum	7
12.	Analisis Hukum Pertanahan	7
13.	Analisis Humas	7
14.	Analisis Informatika	7
15.	Analisis Investasi dan Permodalan Usaha	7
16.	Analisis Kawasan Transmigrasi	7
17.	Analisis Kebijakan BMN	7
18.	Analisis Kebutuhan Diklat	7
19.	Analisis Kelembagaan	7
20.	Analisis Kemitraan	7
21.	Analisis Kerjasama	7
22.	Analisis Kerjasama Bilateral dan Regional	7
23.	Analisis Kerjasama dan Permodalan	7
24.	Analisis Kerjasama Diklat	7
25.	Analisis Kerjasama Luar Negeri	7
26.	Analisis Kerjasama Multilateral	7
27.	Analisis Kesejahteraan SDM Aparatur	7
28.	Analisis Keuangan	7
29.	Analisis Koperasi	7
30.	Analisis Kurikulum dan Pembelajaran	7

No.	Nama Jabatan Pelaksana	Kelas Jabatan
1	2	3
31.	Analisis Laporan Hasil Pengawasan	7
32.	Analisis Laporan Keuangan	7
33.	Analisis Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	7
34.	Analisis Lingkungan Hidup	7
35.	Analisis Mitigasi Bencana	7
36.	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	7
37.	Analisis Organisasi	7
38.	Analisis Organisasi dan Tata Laksana	7
39.	Analisis Pangan	7
40.	Analisis Pariwisata	7
41.	Analisis Pelaporan	7
42.	Analisis Pelayanan	7
43.	Analisis Pelayanan Sosial	7
44.	Analisis Pemanfaatan Teknologi	7
45.	Analisis Pemasaran	7
46.	Analisis Pemasaran dan Kerjasama	7
47.	Analisis Pembangunan	7
48.	Analisis Pemberdayaan Masyarakat	7
49.	Analisis Pembinaan Pengelolaan Usaha	7
50.	Analisis Pemerintahan	7
51.	Analisis Pemerintahan Pusat	7
52.	Analisis Pendidikan	7
53.	Analisis Penegakan Integritas dan Pendidikan	7
54.	Analisis Penelitian dan Pengembangan	7
55.	Analisis Pengaduan Masyarakat	7
56.	Analisis Pengelola BMN	7
57.	Analisis Pengelolaan Sarana Program	7
58.	Analisis Pengembangan Ekonomi Desa	7
59.	Analisis Pengembangan Ekonomi Pedesaan	7
60.	Analisis Pengembangan Energi	7
61.	Analisis Pengembangan Kompetensi	7
62.	Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana	7
63.	Analisis Pengembangan SDM Aparatur	7
64.	Analisis Pengembangan Sistem Informasi	7

No.	Nama Jabatan Pelaksana	Kelas Jabatan
1	2	3
65.	Analisis Pengembangan Teknologi Tepat Guna	7
66.	Analisis Penilaian Tanah dan Kawasan	7
67.	Analisis Penyelenggaraan Diklat	7
68.	Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	7
69.	Analisis Perbendaharaan	7
70.	Analisis Perekonomian	7
71.	Analisis Perencanaan	7
72.	Analisis Perencanaan Anggaran	7
73.	Analisis Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	7
74.	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	7
75.	Analisis Pertanahan	7
76.	Analisis Perundang-undangan	7
77.	Analisis Produk Hukum	7
78.	Analisis Program	7
79.	Analisis Program dan Anggaran	7
80.	Analisis Program Diklat	7
81.	Analisis Program Kerjasama Lembaga Masyarakat	7
82.	Analisis Protokol	7
83.	Analisis Publikasi	7
84.	Analisis Rencana Program Dan Kegiatan	7
85.	Analisis Sistem Informasi	7
86.	Analisis Sistem Informasi dan Jaringan	7
87.	Analisis Sosial	7
88.	Analisis Sosial Budaya	7
89.	Analisis Standarisasi dan Sertifikasi	7
90.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	7
91.	Analisis Survei, Pengukuran, dan Pemetaan	7
92.	Analisis Tata Laksana	7
93.	Analisis Tata Ruang	7
94.	Analisis Tata Usaha	7
95.	Penelaah Bahan Kajian Bencana Alam	7
96.	Penelaah Bidang Sosial	7
97.	Penelaah Dampak Lingkungan	7

No.	Nama Jabatan Pelaksana	Kelas Jabatan
1	2	3
98.	Penelaah Data Sumber Daya Alam	7
99.	Penelaah Kebijakan dan Strategi	7
100.	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	7
101.	Penelaah Pengembangan Usaha	7
102.	Pengevaluasi Pelaksana Kegiatan dan Anggaran	7
103.	Penyusun Rencana Ketatausahaan dan Persuratan	7
104.	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7
105.	Penyusun Bahan Kerja Sama dan Kemitraan	7
106.	Penyusun Bahan Kerjasama	7
107.	Penyusun Bahan Kerjasama Pelatihan	7
108.	Penyusun Bahan Materi Bimbingan Teknis	7
109.	Penyusun Bahan Prasarana Penerapan Standar	7
110.	Penyusun Bahan Publikasi dan Promosi	7
111.	Penyusun Bimbingan Teknis	7
112.	Penyusun Data dan Informasi	7
113.	Penyusun Evaluasi dan Pelaporan	7
114.	Penyusun Laporan Hasil Diklat	7
115.	Penyusun Laporan Keuangan	7
116.	Penyusun Perancangan Perundang-Undangan	7
117.	Penyusun Perencana Evaluasi dan Pelaporan	7
118.	Penyusun Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	7
119.	Penyusun Perencanaan Program dan Kegiatan	7
120.	Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan	7
121.	Penyusun Program dan Rencana Anggaran	7
122.	Penyusun Protokol	7
123.	Penyusun Rencana Bimbingan Teknis UMKM	7
124.	Penyusun Rencana Evaluasi dan Pelaporan	7
125.	Penyusun Rencana Identifikasi Potensi Pulau-Pulau Kecil	7
126.	Penyusun Rencana Jaringan Distribusi	7
127.	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah	7

No.	Nama Jabatan Pelaksana	Kelas Jabatan
1	2	3
	Tangga & Perlengkapan	
128.	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	7
129.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7
130.	Penyusun Rencana Kemitraan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah	7
131.	Penyusun Rencana Kerja Sama Industri	7
132.	Penyusun Rencana Ketatausahaan dan Persuratan	7
133.	Penyusun Rencana Mitigasi dan Adaptasi	7
134.	Penyusun Rencana Mutasi	7
135.	Penyusun Rencana Organisasi dan Tata Laksana	7
136.	Penyusun Rencana Pemanfaatan Kawasan	7
137.	Penyusun Rencana Pengembangan Produk Skala Kecil, Mikro, Menengah	7
138.	Penyusun Rencana Promosi	7
139.	Penyusun Rencana Rumah Tangga dan Perlengkapan	7
140.	Penyusun Rencana Tata Ruang	7
141.	Penyusun Rencana Tindak Lanjut dan Hasil Pengawasan	7
142.	Penyusun Risalah	7
143.	Petugas Standarisasi dan Sertifikasi	7
144.	Ajudan	6
145.	Pengelola Administrasi Kepegawaian	6
146.	Pengelola anggaran	6
147.	Pengelola Bahan Perencanaan	6
148.	Pengelola Bantuan Hukum	6
149.	Pengelola Barang Milik Negara	6
150.	Pengelola Bimbingan Masyarakat	6
151.	Pengelola Bimbingan Teknis dan Bantuan Teknis	6
152.	Pengelola Data	6
153.	Pengelola Data dan Informasi	6
154.	Pengelola Data Kekayaan Budaya	6
155.	Pengelola Data Penyelenggaraan Diklat	6
156.	Pengelola Data Sarana dan Prasarana	6

No.	Nama Jabatan Pelaksana	Kelas Jabatan
1	2	3
	Pendidikan	
157.	Pengelola Data Tata Organisasi dan Tata Laksana	6
158.	Pengelola Database	6
159.	Pengelola Dokumen Perizinan	6
160.	Pengelola Dokumentasi	6
161.	Pengelola Dokumentasi Hukum	6
162.	Pengelola Evaluasi	6
163.	Pengelola Evaluasi dan Laporan	6
164.	Pengelola Gaji	6
165.	Pengelola Informasi	6
166.	Pengelola Informasi Kepariwisata	6
167.	Pengelola Informasi Kerjasama	6
168.	Pengelola Informasi Produk Hukum	6
169.	Pengelola Kegiatan Diklat	6
170.	Pengelola Kelayakan Sumber Daya Alam	6
171.	Pengelola Kepegawaian	6
172.	Pengelola Kesejahteraan Sosial	6
173.	Pengelola Ketatausahaan	6
174.	Pengelola Keuangan	6
175.	Pengelola Laporan	6
176.	Pengelola Layanan Kehumasan	6
177.	Pengelola Lingkungan	6
178.	Pengelola mitigasi lingkungan	6
179.	Pengelola Organisasi	6
180.	Pengelola Pelaksanaan Program dan Anggaran	6
181.	Pengelola Pemasaran	6
182.	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	6
183.	Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian	6
184.	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	6
185.	Pengelola Penelitian	6
186.	Pengelola Penguatan dan Pemberdayaan Lembaga	6
187.	Pengelola Penyusun Peraturan Perundang-undangan	6

No.	Nama Jabatan Pelaksana	Kelas Jabatan
1	2	3
188.	Pengelola Penyusunan Rencana dan Program	6
189.	Pengelola Permodalan	6
190.	Pengelola Permodalan dan Investasi	6
191.	Pengelola Pertanahan	6
192.	Pengelola Perumahan dan Permukiman	6
193.	Pengelola Potensi Kemitraan dan Potensi Usaha	6
194.	Pengelola Program dan Kegiatan	6
195.	Pengelola Rumah Tangga	6
196.	Pengelola Sistem Pembelajaran	6
197.	Pengelola Surat	6
198.	Pengelola Umum dan Kepegawaian	6
199.	Pengelola Urusan Rumah Tangga	6
200.	Pengolah Bahan Rencana Penanggulangan Bencana	6
201.	Pengolah Data	6
202.	Pengolah Data Anggaran	6
203.	Pengolah Data Anggaran dan Perbendaharaan	6
204.	Pengolah Data dan Informasi	6
205.	Pengolah Data Kepegawaian	6
206.	Pengolah Data Kewirausahaan	6
207.	Pengolah Data Laporan Keuangan	6
208.	Pengolah Data Perbendaharaan	6
209.	Pengolah Data Program, Anggaran dan Laporan	6
210.	Petugas Protokol	6
211.	Pranata Barang dan Jasa	6
212.	Pranata Kearsipan	6
213.	Pranata Ketrasmigrasian	6
214.	Sekretaris	6
215.	Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	6
216.	Verifikator Anggaran	6
217.	Verifikator Keuangan	6
218.	Komandan Petugas Keamanan	5
219.	Operator Mesin	5

No.	Nama Jabatan Pelaksana	Kelas Jabatan
1	2	3
220.	Pengadministrasi BMN	5
221.	Pengadministrasi Anggaran	5
222.	Pengadministrasi Data dan Informasi	5
223.	Pengadministrasi Data Perundang-undangan	5
224.	Pengadministrasi Hukum	5
225.	Pengadministrasi Kepegawaian	5
226.	Pengadministrasi Kerjasama	5
227.	Pengadministrasi Keuangan	5
228.	Pengadministrasi Pelatihan	5
229.	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5
230.	Pengadministrasi Persuratan	5
231.	Pengadministrasi Program	5
232.	Pengadministrasi Program dan Kerjasama	5
233.	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5
234.	Pengadministrasi Umum	5
235.	Pengemudi	5
236.	Petugas Keamanan	5
237.	Pramu Perlengkapan	5
238.	Pranata Acara	5
239.	Teknisi Peralatan, Listrik dan Elektronika	5

DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL DAN KELAS JABATANNYA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

No	Nama Jabatan Fungsional	Jenjang	Kelas Jabatan
1	2	3	4
1	Analisis Kebijakan	Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya Ahli Utama	8 10 12 14
2	Analisis Kepegawaian	Pelaksana Pelaksana Lanjutan/ Mahir Penyelia Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya	6 7 8 8 9 11
3	Arsiparis	Pelaksana Pelaksana Lanjutan/ Mahir Penyelia Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya Ahli Utama	6 7 8 8 9 11 13
4	Assesor SDM Aparatur	Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya Ahli Utama	8 10 12 14
5	Auditor	Pelaksana Pelaksana Lanjutan/ Mahir Penyelia Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya Ahli Utama	6 7 9 9 10 12 14
6	Auditor Kepegawaian	Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya	8 9 11

No	Nama Jabatan Fungsional	Jenjang	Kelas Jabatan
1	2	3	4
7	Pranata Komputer	Pelaksana Pelaksana Lanjutan/ Mahir Penyelia Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya	6 7 8 8 9 11
8	Dokter Gigi	Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya Ahli Utama	9 10 12 14
9	Dokter	Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya Ahli Utama	9 10 12 14
10	Peneliti	Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya Ahli Utama	8 9 11 14
11	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya	8 9 11
12	Penggerak Swadaya Masyarakat	Pelaksana Pelaksana Lanjutan/ Mahir Penyelia Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya Ahli Utama	6 7 8 8 10 11 14
13	Perancang Peraturan Perundang-Undangan	Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya Ahli Utama	8 9 11 13
14	Perawat	Pelaksana Pemula Pelaksana Pelaksana Lanjutan/ Mahir	5 6 7

No	Nama Jabatan Fungsional	Jenjang	Kelas Jabatan
1	2	3	4
		Penyelia	8
		Ahli Pertama	8
		Ahli Muda	9
		Ahli Madya	11
		Ahli Utama	13
15	Perencana	Ahli Pertama	9
		Ahli Muda	10
		Ahli Madya	12
		Ahli Utama	14
16	Pranata Humas	Pelaksana	6
		Pelaksana Lanjutan/ Mahir	7
		Penyelia	8
		Ahli Pertama	8
		Ahli Muda	9
		Ahli Madya	11
17	Statistisi	Pelaksana	6
		Pelaksana Lanjutan/ Mahir	7
		Penyelia	8
		Ahli Pertama	8
		Ahli Muda	9
		Ahli Madya	11
		Ahli Utama	13
18	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan	Pemula	5
		Terampil	6
		Pelaksana Lanjutan/ Mahir	7
		Penyelia	8
19	Widyaiswara	Ahli Pertama	8
		Ahli Muda	9
		Ahli Madya	11
		Ahli Utama	14

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDUL HALIM ISKANDAR